



Ranah Research
Journal of Multidisciplinary Research and Development

E-ISSN: 2655-0865

082170743613 | ranahresearch@gmail.com | <https://jurnal.ranahresearch.com>

DOI: <https://doi.org/10.38035/rj.v7i6>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Implikasi Konflik Rusia-Ukraina Terhadap Migrasi di Kawasan Uni-Eropa

Natasya Angel Dharmaputra¹, Petsy Jessy Ismoyo², Christian H.J de Frestes³.

¹ Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, Indonesia, 372021012@student.uksw.edu

² Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, Indonesia, petsy.ismoyo@uksw.edu

³ Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, Indonesia, christian.defretes@uksw.edu

Corresponding Author: 372021012@student.uksw.edu¹

Abstract: *This article departs from the migration crisis that occurred in the EU region due to the implications of the Russia-Ukraine conflict that began in 2022. This study uses a qualitative approach using secondary data sources as a reference. Through the migration and policy data reviewed this article aims to understand how migrant patterns are formed as well as the responses of EU member states. The results of the author's analysis show that there is indeed a massive increase in the number of migrants, especially refugees and asylum seekers in the EU region. As for the number of criticisms raised by Member States against the migration phenomenon, leading the European Union to carry out major reforms to its migration policy. The EU migration and asylum pact seeks to address the influx of illegal migrants at the border to a more equitable distribution of responsibilities.*

Keyword: *Migration, European-Union, Russia-Ukraine*

Abstrak: Artikel ini berangkat dari krisis migrasi yang terjadi di kawasan Uni-Eropa akibat implikasi konflik Rusia-Ukraina yang dimulai pada tahun 2022. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan menggunakan sumber data sekunder sebagai acuannya. Melalui data migrasi dan kebijakan yang ditinjau artikel ini bertujuan untuk memahami bagaimana pola migran yang terbentuk serta tanggapan negara anggota Uni-Eropa. Hasil analisis penulis menunjukkan bahwa benar adanya peningkatan besar-besaran terhadap jumlah migran khususnya pengungsi dan pencari suaka di kawasan Uni-Eropa. Adapun sejumlah kritik yang diajukan oleh para negara anggota terhadap fenomena migrasi, menuntun Uni-Eropa untuk melakukan reformasi besar-besaran terhadap kebijakan migrasinya. Hadirnya Pakta Migrasi dan Suaka Uni-Eropa berupaya untuk mengatasi masuknya migran ilegal di perbatasan hingga pembagian tanggungjawab yang lebih merata.

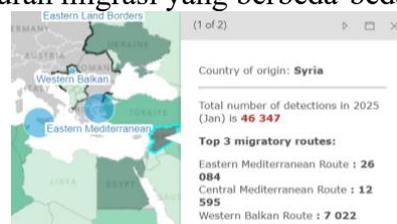
Kata Kunci: Migrasi, Uni-Eropa, Rusia-Ukraina.

PENDAHULUAN

Perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina pada 24 Februari 2022 (Ray, 2025), merupakan hasil dari konflik yang tidak terselesaikan oleh kedua negara pada tahun-tahun sebelumnya. Sebelumnya konflik ini juga sempat memanas pada tahun 2014, yang diakhiri dengan kegagalan Ukraina dalam mempertahankan wilayah wilayah Krimea dan terjadinya konflik bersenjata yang terjadi di Donbas. Pada tahun 2022, konflik antara Rusia dan Ukraina kembali memuncak. Perang antara kedua negara tersebut diawali oleh invasi yang dilakukan Rusia ke beberapa wilayah perbatasan Ukraina seperti Kyiv, Kharkiv, Odessa, dan beberapa wilayah lainnya. Invasi yang dilakukan Rusia ini dilatarbelakangi oleh ketidaksetujuan pemerintah Rusia terhadap tindakan pemerintah Ukraina yang akan bergabung dengan organisasi NATO (*The North Atlantic Treaty Organization*). Dengan bergabungnya Ukraina sebagai negara anggota NATO, geopolitik Rusia akan semakin terancam dengan kehadiran kekuatan dari Barat di perbatasan wilayah Rusia dengan Ukraina. Hingga di tahun 2025 ini, berbagai upaya perdamaian tengah dikerahkan oleh organisasi – organisasi internasional serta negara – negara untuk memadamkan konflik antara Rusia dan Ukraina yang belum kunjung menemukan titik perdamaian.

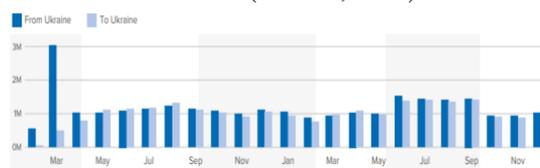
Konflik yang terjadi di wilayah Rusia-Ukraina turut memberikan dampak terhadap ketidakstabilan politik, ekonomi, hingga pasokan suplai barang dan energi di wilayah Eropa. Tidak dapat dipungkiri ketidakstabilan wilayah Eropa Timur juga turut menjadi dampak dari konflik kedua negara tersebut. Meningkatnya ketidakstabilan wilayah di Eropa Timur turut berimbas pada kesejahteraan masyarakat Eropa Timur maupun negara di sekitarnya. Sehingga para migran dan pengungsi dari Eropa Timur memilih untuk bermigrasi dan menetap di wilayah Eropa Barat khususnya negara anggota Uni Eropa yang memiliki wilayah lebih aman.

Menurut UNHCR (2019), definisi migran tidak didefinisikan oleh hukum internasional. Sehingga penggunaan konsep migran dapat mengacu pada makna yang berbeda tergantung kepentingan dari aktor yang menggunakannya. Namun migran dapat didefinisikan secara umum yaitu individu yang berpindah dari suatu negara ke negara lain untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Migran tidak hanya seputar pada seseorang yang mencari pekerjaan di negara lain saja, melainkan menurut UNHCR (2019) pencari suaka dan pengungsi yang terjangkit konflik di negara asalnya juga termasuk dalam kategori migran campuran. Dalam bermigrasi terdapat proses-proses tertentu yang telah diatur dalam peraturan di suatu kawasan ataupun negara. Sehingga pasti setiap negara dan kawasan memiliki proses maupun peraturan migrasi yang berbeda-beda.



Gambar.1 Peta dan Data Jumlah Migran dari Suriah

Sumber : (Frontex, 2025)



Gambar .2 Data Jumlah Pergerakan di Perbatasan Ukraina Tahun 2022-2023

Sumber : (USA for UNHCR, 2025)

Berdasarkan data yang diperoleh dari *Frontex European Union* pada Gambar.2, dapat ditemukan lima negara utama yang mendominasi kehadiran migran di Uni Eropa seperti Suriah, Afghanistan, Tunisia, Bangladesh dan Mesir. Menurut data yang hadir dalam

Gambar.1, Suriah menjadi negara dengan profil migran terbanyak dari migran yang masuk ke wilayah Uni Eropa dengan jumlah 247,982 jiwa terhitung Februari 2022 (Frontex, 2025). Terhitung pada Januari 2025 sebanyak 46.347 masyarakat Suriah memasuki wilayah Uni Eropa. Terdapat tiga rute utama yang masyarakat Suriah gunakan yaitu *Eastern mediterranean Route* yang melalui Turki dan Yunani, *Central Meditteranean Route* yang melalui Laut Mediterania dan *Western Balkan Route* yang melalui Turki-Yunani yang dilanjutkan dengan melintasi negara-negara di Pegunungan Balkan. Dinamika migran di Uni Eropa juga dipenuhi dengan kehadiran para pengungsi Ukraina dengan jumlah sekitar 6,3 juta jiwa. Kehadiran arus migran campuran yang besar ini berdampak pada penumpukan migran dan pengungsi di wilayah Eropa Barat (Ramadhani et al., 2022). Penumpukan migran dan pengungsi juga memberikan tanggungjawab tambahan bagi negara anggota Uni Eropa yang menerima para dan memberikan tekanan bagi negara anggota Uni Eropa khususnya di wilayah barat.

Organisasi regional merupakan suatu bagian dari dunia yang sama-sama diikat oleh kesamaan tujuan berdasarkan ikatan geografis, sosial, budaya, ekonomi, politik dan struktur formal yang memberikan arahan pada berbagai kesepakatan intergovernmental secara formal (Nuraeini S. et al., 2010). Pernyataan ini dapat diterima karena konsep regional sendiri merupakan suatu wilayah yang berdekatan dan biasanya memiliki kesamaan terhadap kondisi geografis, sosial budaya, ekonomi hingga politik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa organisasi regional terdiri atas negara anggota yang memiliki kedekatan geografis satu sama lain. Hal tersebut juga menjadi salah satu faktor yang membedakan antara organisasi regional dan organisasi internasional yang biasanya beranggotakan negara-negara di seluruh dunia tanpa memandang kedekatan geografis dan persamaan aspek lainnya.

Setiap organisasi terkhususnya internasional dan regional harus memiliki *legal personality*. Menurut Sumaryo Suryokusuma, *Legal Personality* merupakan konsep yang menentukan suatu aktor dapat memiliki hak dan kewajiban yang berdasarkan hukum internasional (Puspoayu, 2017). Adapun beberapa syarat yang harus dipenuhi suatu organisasi regional untuk memiliki status *legal personality*, diantaranya adalah :

1. Organisasi tersebut harus merupakan himpunan negara yang bersifat tetap dan memiliki struktur organisasi,
2. Hubungan antara organisasi dengan negara anggota memiliki perbedaan dalam kewenangan maupun tujuan,
3. Kewenangan hukum yang dimiliki organisasi dapat diterima dan diterapkan dalam ruang lingkup internasional. Dapat diartikan dengan organisasi regional tersebut harus diakui sebagai aktor tersendiri dalam lingkup internasional.

Adapun beberapa syarat lainnya yang juga mendukung organisasi internasional maupun regional dalam memperoleh *legal personality*, yaitu :

1. *The treaty making powers*, setiap organisasi harus memiliki kemampuan untuk membentuk regulasi maupun perjanjian kerjasama dengan aktor internasional lainnya,
2. Setiap organisasi harus memiliki hak dan kewenangan secara hukum untuk memiliki aset berupa barang, modal, bangunan yang dimiliki organisasi,
3. Kemampuan dalam mengajukan tuntutan baik terhadap negara anggota maupun negara anggota jika terdapat hal yang merugikan atau mengancam organisasi,
4. *Locus standi* yaitu pengajuan perkara ke pengadilan internasional yang berdasarkan yurisdiksi internasional,
5. Memiliki perlindungan fungsional terhadap para personil yang bekerja dalam organisasi regional.
6. Memiliki pengakuan oleh negara maupun organisasi lain dalam mengirimkan perwakilan untuk menghadiri kegiatan berskala internasional.

Berdasarkan syarat-syarat *legal personality* yang telah dipaparkan, organisasi Uni Eropa mampu dikategorikan sebagai aktor dalam sistem internasional. Pemenuhan syarat

tersebut pertama-tama dapat dibuktikan melalui struktur organisasi yang dimiliki. Pada tahun 1993 melalui perjanjian *Maastricht*, Uni Eropa memiliki tiga pilar kerjasama (Perwita, 2017). Pilar pertama merupakan *European Communities* yang menangani regulasi internal di Uni Eropa. *Common Foreign and Security Policy* merupakan pilar yang menangani kebijakan luar negeri dan keamanan. Serta *Justice and Home Affairs* merupakan pilar yang menangani peradilan dan masalah dalam negeri hingga isu migran.



Gambar.3 Struktur Organisasi Uni Eropa
 Sumber : (Fettouche, 2021)

Struktur Uni Eropa mengalami penyederhanaan sistem untuk menyatukan kebijakan-kebijakan Uni Eropa. Berdasarkan Gambar.3 yang ditulis oleh (Fettouche, 2021) struktur baru Uni Eropa terdiri atas :

1. Bagian Eksekutif
 - a. Komisi Eropa bertugas mengusulkan, menjelaskan dan memastikan kepatuhan terhadap undang-undang Uni Eropa. Undang-undang Uni Eropa bersifat mengikat dan harus diutamakan dibandingkan undang-undang nasional yang dimiliki negara anggota.
 - b. Dewan Uni Eropa, berisikan perwakilan dari setiap negara anggota Uni Eropa. Dewan ini memiliki peranan dalam pengambilan keputusan bersama lembaga legislatif.
 - c. Dewan Eropa yang berperan dalam menentukan prioritas Uni Eropa dan berisikan perwakilan negara anggota.
2. Lembaga Legislatif
 - a. Parlemen Eropa, berisikan perwakilan warga negara Uni Eropa yang dipilih secara langsung. Parlemen Eropa berperan dalam mengesahkan perundang-undangan Uni Eropa.
3. Lembaga Yudikatif
 - a. *Court of Justice of The European Union* (CJEU) bertugas dalam memberikan penafsiran terhadap hukum Uni Eropa terhadap negara anggota dan menyelesaikan sengketa yang terjadi secara internal.
4. Lembaga Keuangan
 - a. *European Central Bank*, bertugas dalam mengatur kebijakan moneter di Uni Eropa dan menjaga peredaran valuta asing dan stabilitas nilai euro.
 - b. *European Court of Auditors*, bertugas dalam mengawasi dan memeriksa anggaran yang dimiliki oleh Uni Eropa (European Union, 2025).

Uni Eropa yang pada awalnya hanya berfokus pada regulasi ekonomi kawasan. Namun pengaruh Uni Eropa sebagai organisasi regional semakin meluas dengan dibentuknya berbagai regulasi lainnya berdasarkan aspek lainnya seperti migrasi. Hadirnya migran dalam jumlah besar dalam kawasan Uni Eropa menjadi isu dan tantangan baru untuk Uni Eropa. Pecahnya konflik antara Rusia Ukraina, turut memperparah permasalahan migran di Uni Eropa. Banyak negara anggota seperti Polandia, Jerman dan Italia yang merasa kewalahan dengan hadirnya migran yang dirasa melebihi kapasitas negara anggota. Ketidakmampuan negara anggota dalam memenuhi kebutuhan migran juga menjadi beban dan tanggungjawab negara. Selain permasalahan finansial untuk para migran, angka pengangguran di negara anggota juga terus bertambah dan berdampak pada penurunan pertumbuhan ekonomi negara. Kehadiran para migran yang tidak terkontrol juga memiliki potensi untuk memicu gejolakan dari masyarakat asli. Persaingan dalam lapangan kerja, sumber daya, serta kekhawatiran

keamanan dapat menjadi asal mula gejolakan di masyarakat. Maka dari itu penelitian ini akan berusaha untuk melihat bagaimana Uni Eropa merespon permasalahan mengenai dinamika migran yang hadir di negara anggotanya.

Jika didefinisikan secara umum, migran internasional merupakan individu yang berpindah dari suatu negara ke negara lain untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak (United Nation, 1998). Dinamika migrasi terus meningkat seiring hadirnya globalisasi yang mendukung kemudahan dalam berpindah tempat. Namun perlu diketahui kegiatan bermigrasi merupakan salah satu aktivitas manusia yang telah ada sejak zaman purba (Achsin, 2021). Pernyataan ini dapat diterima dengan melihat persamaan dari tujuan bermigrasi manusia yaitu untuk bertahan hidup dengan mencari tempat yang lebih layak. Aktivitas bermigrasi juga berperan dalam membentuk kelompok-kelompok hingga komunitas dalam berkehidupan sosial, yang setiap komunitasnya memiliki wilayah kekuasaan masing-masing. Kuasa yang dimiliki atas wilayah tersebut menjadi awal mula terbentuknya batas-batas wilayah yang hadir pada zaman sekarang.

Berdasarkan informasi yang didapat dari situs European Commission, migran dapat dikategorisasikan ke dalam beberapa kategori (European Commission, 2019), diantaranya adalah :

- a. *Economic migrant* merupakan individu yang meninggalkan negara asalnya dengan alasan ekonomi, dan pergi ke negara lain untuk mendapatkan pekerjaan baru.
- b. *Emigrant* merupakan individu yang memiliki kewarganegaraan yang pergi untuk tinggal di negara lain dalam jangka waktu lebih dari setahun. Dalam konteks perlindungan yang dimiliki Uni Eropa, jika seseorang menetap di negara lain dengan kurun waktu kurang dari 12 bulan, segala bentuk perlindungan dan hukum yang dimiliki masih berasal dari negara asalnya.
- c. *Forced migrant* merupakan individu yang terpaksa untuk melakukan migrasi karena adanya ancaman terkait kelangsungan hidupnya seperti para pengungsi perang maupun bencana alam.
- d. *Immigrant* merupakan individu yang tidak memiliki kewarganegaraan dan akan tinggal pada negara yang ditujuinya dalam kurun waktu lebih dari satu tahun.
- e. *Long-Term migrant* merupakan individu yang berpindah dan menetap bahkan menjadi warga negara di negara tujuannya lebih dari 12 bulan.
- f. *Short-Term migrant* merupakan individu yang berpindah ke negara lain namun dengan jangka waktu yang relatif pendek yaitu kurang dari 12 bulan. Biasanya migran ini hadir untuk melakukan perjalanan bisnis, perawatan medis hingga berlibur.
- g. *Stranded migrant* merupakan migran yang terpaksa untuk tinggal di negara lain karena ketidakmampuan dalam melanjutkan perjalanannya ke negara asal atau negara tujuan. Pada dasarnya keadaan ini disebabkan oleh ketidaklengkapan dokumen yang dimiliki para migran, prosedur hukum yang panjang, dan kondisi lainnya dalam hal politik, kesehatan hingga finansial.

Dalam beberapa kajian sebelumnya, telah banyak dibahas mengenai implikasi konflik Rusia-Ukraina dalam berbagai aspek yang turut menjadi penyokong kestabilan negara, regional hingga skala global. Seperti dalam tulisan Totok Adhi Prasetyo yang menjelaskan mengenai perang Rusia-Ukraina telah memberikan pengaruh yang besar dalam perekonomian internasional. Secara lanjut dijelaskan hadirnya lonjakan harga komoditas seperti minyak, gas, dan pangan berdampak pada meningkatnya inflasi di berbagai negara khususnya di wilayah Eropa. Selain mengganggu kestabilan ekonomi internasional, perang ini juga menghambat upaya transisi energi menjadi energi ramah lingkungan (Prasetyo et al., 2024).

Kajian serupa yang dituliskan oleh Dina Siti Logayah membahas mengenai implikasi konflik Rusia-Ukraina dalam perspektif krisis pasokan energi. Dalam hasil tulisannya konflik Rusia-Ukraina menjadi faktor terjadinya krisis energi di Eropa. Krisis energi ini juga berdampak pada sektor lainnya seperti lambatnya pertumbuhan ekonomi, kenaikan harga,

hingga hilangnya pekerjaan masyarakat. Namun tidak dipungkiri terjadinya krisis energi ini juga menciptakan dan mendorong peluang baru bagi negara-negara Eropa. Melonjaknya nilai investasi pada energi terbaru, penghematan dan efisiensi energi, mengembangkan infrastruktur energi, inovasi teknologi energi hingga meningkatkan kerjasama internasional untuk mendapat pasokan cadangan energi serta pengembangan sumber energi alternatif menjadi hasil akhir positif yang didapatkan dari kajiannya (Logayah et al., 2023).

Walaupun adapula tulisan yang telah mengkaji implikasi konflik Rusia-Ukraina dalam sektor migrasi seperti yang dituliskan Sugito. Kajian tersebut turut membantu penulis dalam membuka perspektif lain mengenai isu migrasi di Uni-Eropa. Dalam tulisannya Sugito menemukan bahwa negara-negara Visegrad seperti Hungaria, Ceko, Polandia dan Slovakia menggunakan isu migran untuk menolak kebijakan Uni Eropa terkait penanganan migran. Adapun penolakan ini merupakan bentuk keberatan negara-negara Visegrad terkait gelombang migrasi di perbatasan yang membuat mereka kewalahan. Isu migran dikampanyekan sebagai ancaman bagi negara khususnya dalam keamanan, identitas nasional dan kesejahteraan ekonomi. Tindakan politisasi terkait isu migran ini digunakan oleh partai-partai politik yang mayoritas bersayap kanan untuk memperoleh suara dari masyarakat (Sugito, 2021). Melalui kajian literatur ini, membuka pandangan penulis untuk tidak melihat persoalan isu migrasi di Eropa melalui satu sisi saja. Dari kajian ini juga penulis berupaya untuk melihat apakah ada relevansi implementasi kebijakan migran dengan kedudukan negara anggota Uni-Eropa dalam penulisan ini. Adapun negara anggota yang menjadi unit amatnya yaitu Jerman dan Polandia.

Dinamika migrasi yang terjadi di Uni-Eropa tidak lepas dari kebijakan *Freedom of Movement* yang menjadi pilar fundamental dalam kebijakan migrasi. Uni-Eropa menetapkan empat kebijakan migrasi ke dalam kategori utama yang terdiri dari *Common European Legal Migration Policy*, *Border Management Policy*, *Common European Asylum System*, *Irregular Migration Policy* (yulia hartati, 2016). *Freedom of Movement* merupakan kebijakan yang ditetapkan dalam Perjanjian *Maastricht* yang menjadi landasan dari terbentuknya Uni Eropa pada tahun 1992. Kebijakan ini mengatur hak masyarakat Uni Eropa untuk berpindah tempat tinggal dengan bebas di seluruh negara anggota Uni Eropa (Marzocchi, 2024). Sementara di tahun 1999 *Common European Asylum System* juga hadir dalam rangka keterbukaan Uni-Eropa bagi masyarakat luar Uni-Eropa yang membutuhkan perlindungan. Dengan dukungan dari kebijakan ini, pada akhirnya banyak migran dan pengungsi yang memilih untuk menetap di negara anggota Uni Eropa. Jerman, Prancis, Spanyol, Italia, Hungaria dan Polandia merupakan negara – negara yang menjadi penerima migran dan pengungsi terbanyak. Sehingga dalam kajian ini, penulis berusaha untuk mengkaji bagaimana dinamika migrasi yang terjadi di kawasan Uni-Eropa yang diimplikasikan oleh Perang Rusia-Ukraina sejak tahun 2022.

METODE

Penelitian kualitatif merupakan metode pendekatan penelitian yang menurut Creswell, prosedur pengumpulan datanya melalui observasi kualitatif, interview kualitatif, dokumen kualitatif, serta audio dan visual. Pengumpulan data juga dapat dalam bentuk narasi, pengalaman dan interpretasi (Ishtiaq, 2019). Penelitian kualitatif juga akan menghasilkan data yang serupa dalam pengumpulan datanya yaitu berupa narasi. Menurut Chariri dalam (Fadli, 2021), penelitian kualitatif ditujukan untuk menginvestigasi dan memahami fenomena-fenomena yang terjadi dalam kehidupan. Sehingga tujuan utama dari dilakukannya penelitian kualitatif deskriptif adalah supaya peneliti dan pembaca dapat memahami secara mudah terkait fenomena Dinamika Migran di Kawasan Uni Eropa sebagai Implikasi Konflik Rusia Ukraina yang dideskripsikan dan dapat menghasilkan hipotesa baru.

Menurut Patton pada (Kasinath, 2013), terdapat tiga alasan mengapa penelitian kualitatif menjadi metode yang dapat dipilih. Alasan pertama adalah pendekatan kualitatif

dianggap lebih selaras dengan nilai-nilai humanistik, karena memberikan ruang untuk memahami pengalaman manusia secara mendalam dan dalam konteksnya. Penelitian kualitatif juga biasanya sangat dihargai dalam bidang pendidikan. Kedua, keterbatasan yang dimiliki pada metode kuantitatif juga membuat metode kualitatif dapat diterima. Serta metode kualitatif dapat menjadi pelengkap dan menjelaskan secara mendalam mengenai data yang ada dalam penelitian kuantitatif.

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan data sekunder sebagai data utama. Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung, melainkan melalui pengumpul data yang dapat berupa dokumen maupun data dari penulisan orang lain (Mouwn Erland, 2020). Teknik dalam pengambilan sumber data ini akan melalui studi literatur yang mengkaji berbagai data yang telah ada sebelumnya. Data-data yang digunakan dalam penulisan ini berupa jurnal, buku, dokumen kebijakan Uni Eropa, kutipan pidato hingga dokumen yang dimiliki pemerintah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Migrasi Di Kawasan Uni Eropa

Dinamika migrasi merupakan arus masuk dan keluarnya para migran di suatu wilayah. Di Uni-Eropa dinamika migrasi juga telah menjadi salah satu fenomena yang cukup banyak diperbincangkan akhir-akhir ini. Pergerakan dinamika migrasi ini turut dilatarbelakangi oleh beberapa isu politik, ekonomi, sosial dan konflik yang terjadi di wilayah Eropa maupun di sekitarnya seperti di wilayah Timur Tengah. Masuk keluarnya para migran ke wilayah Uni Eropa tentunya akan memengaruhi kebijakan yang sudah ada maupun pembuatan kebijakan baru. Untuk memahami bagaimana fluktuatifnya dinamika migrasi di kawasan Uni-Eropa akibat implikasi konflik Rusia-Ukraina yang terjadi pada tahun 2022, berikut akan disajikan data mengenai jumlah masuknya migran ke wilayah Uni-Eropa.

Tabel.1 Data Jumlah Penduduk Ukraina Sebagai Penerima Perlindungan Sementara

Tahun	Jumlah
2022	3.752.790
2023	4.204.115
2024	4.189.980
04-2025	4.193.540

Sumber : (Eurostat, 2025b)

Data pada Tabel.1 menyajikan data terkait jumlah individu yang merupakan penerima perlindungan sementara dari Uni-Eropa yang berasal dari Ukraina. Terhitung semenjak Maret 2022 hingga Desember 2022, jumlah individu yang menerima perlindungan sementara dari Uni-Eropa berkisar 3.752.790 jiwa. Pemberian perlindungan sementara ini merupakan bagian kebijakan migrasi yaitu *Temporary Protection Directive* yang dimiliki Uni-Eropa. Kebijakan ini merupakan upaya Uni-Eropa dalam menanggapi dan membantu krisis kemanusiaan yang terjadi di Ukraina pada tahun 2022 (GENÇ & ŞİRİN ÖNER, 2019). Jumlah penerima perlindungan sementara ini turut mengalami kenaikan di tahun 2023 menjadi 4.204.115 jiwa. Hingga di tahun 2024 dan 2025, jumlah masyarakat Ukraina yang menerima perlindungan sementara berkurang menjadi 4,189,980 jiwa dan 4,193,540 jiwa. Penurunan ini dapat disebabkan oleh adanya perubahan status pada masyarakat penerima perlindungan sementara ataupun kembalinya sebagian masyarakat Ukraina ke wilayahnya. Dari fenomena ini dapat dilihat bahwa meningkatnya jumlah penduduk Ukraina di wilayah Uni-Eropa merupakan suatu konsekuensi dari diterapkannya kebijakan *Temporary Protection Directive*.

Melalui kebijakan *Temporary Protection Directive*-nya, Uni-Eropa berupaya untuk menunjukkan rasa solidaritasnya dalam membantu krisis kemanusiaan akibat terjadinya konflik Rusia-Ukraina. Hal ini turut membantu Uni-Eropa dalam membentuk citra positifnya di kawasan Eropa. Kebijakan TPD ini telah hadir jauh sebelum konflik tahun 2022 ini terjadi dan pertama kali dikenalkan pada tahun 2001. Namun kebijakan *Temporary Protection*

Directive ini tidak pernah diimplementasikan oleh Uni-Eropa. Meletusnya konflik Rusia-Ukraina di tahun 2022 menjadi awal dari diimplementasikannya kebijakan TPD di Uni-Eropa. Pada tanggal 2 Maret 2022, Komisi Eropa menjadi lembaga yang mengusulkan pengaktifan *Temporary Protection Directivet* untuk membantu pengungsi dari Ukraina. Selain memberikan perlindungan secara fisik dari ancaman Rusia, kebijakan ini juga memberikan akses kepada pengungsi Ukraina untuk mendapatkan izin tinggal, pendidikan, kesehatan, menjadi tenaga kerja hingga mendapatkan bantuan kesejahteraan sosial (Luyten, 2024). Kebijakan ini turut membantu dan menarik perhatian para pengungsi untuk menuju kawasan Uni-Eropa. Namun dengan masuknya kehadiran migran dan pengungsi yang berlebihan, tidak sedikit dari masyarakat Uni-Eropa yang merasa resah dengan kondisi tersebut. Tidak hanya masyarakat Uni-Eropa, beberapa negara yang menjadi tujuan utama para pengungsi juga merasa fenomena tersebut membawa tekanan yang lebih besar di wilayah nasionalnya.

Tabel.2 Data Jumlah Penduduk Ukraina Sebagai Pelamar Suaka

Tahun	Jumlah
2021	5.325
2022	24.690
2023	12.755
2024	25.050

Sumber : (Eurostat, 2025a)

Berdasarkan data pada Tabel.2 , kawasan Uni-Eropa mengalami lonjakan angka pelamar suaka yang berasal dari Ukraina. Dimulai dari awal terjadinya invasi ke Ukraina di tahun 2022, pelamar suaka yang berasal dari Ukraina yang mencapai sebesar 24.690 jiwa. Jika dibandingkan dengan data di tahun 2021 yang hanya memiliki angka 5.325 jiwa, angka ini mengalami lonjakan sebesar empat kali lipat. Walaupun pada tahun 2023 angka pelamar suaka mengalami penurunan, memasuki tahun 2024 angka tersebut kembali melonjak dua kali lipat dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 25,050 jiwa. Lonjakan jumlah pelamar suaka di tahun 2024 secara jelas mengindikasikan bahwa konflik antara Rusia dan Ukraina masih terus berlangsung. Angka-angka ini juga menegaskan bagaimana dampak konflik tersebut masih berimplikasi sangat besar dan merugikan kehidupan masyarakat sipil.

Jika melihat berdasarkan data dan fakta yang ada dalam data Tabel.1 dan Tabel.2, secara garis besar dapat disimpulkan bahwa para migran asal Ukraina yang masuk ke dalam Uni-Eropa akibat konflik antara Rusia-Ukraina merupakan migran dengan kategori *force migrant*. Argumen ini dapat dibuktikan melalui penjelasan umum mengenai *force migrant* yang mana individu terpaksa untuk meninggalkan wilayahnya karena adanya kekerasan serta ancaman terkait kelangsungan hidupnya. Krisis kemanusiaan di Ukraina akibat perang juga menjadi faktor utama dari melonjaknya arus migrasi dari Ukraina memasuki wilayah Uni-Eropa. Krisis migrasi di kawasan Uni-Eropa juga sempat terjadi, yang mana membawa sebanyak kurang lebih dua juta IDP atau *Internally Displaced People* serta tiga puluh juta pencari suaka (Quinn & Ruiz, 2022). Kehadiran kembali konflik yang terjadi pada 2022 ini semakin mempersulit keadaan pemerintah nasional untuk menangani kondisi individu-individu yang telah terlantar sebelumnya di wilayah Uni-Eropa karena krisis migrasi yang juga terjadi di tahun 2014 silam.

Tanggapan Negara Anggota Terhadap Kejijakan Migrasi Uni-Eropa

Fluktuasi data kuantitatif mengenai arus masuk migran belum sepenuhnya merepresentasikan kompleksitas dinamika migrasi yang terjadi di Kawasan Uni-Eropa. Pergerakan migran untuk menetap di wilayah lain turut dipengaruhi dari interaksinya dengan dinamika sosial, politik, ekonomi yang terjadi di kawasan negara anggota Uni-Eropa. Dalam dimensi politik, konflik yang terjadi di dalam maupun di luar kawasan Uni-Eropa hingga kebijakan yang dibentuk negara anggota turut berperan dalam pembentukan pola migrasi yang ada. Dalam bagian sub-bab ini akan dibahas secara lebih lanjut mengenai tanggapan

negara anggota terhadap krisis migran di kawasan Uni-Eropa serta dinamika yang terjadi di dalamnya. Serta dalam tulisan ini, penulis menetapkan Jerman dan Polandia sebagai negara anggota yang akan menjadi amatan dalam kondisi dinamika yang terjadi di wilayahnya. Adapun Jerman merupakan negara dengan penerima pengungsi terbanyak di Uni-Eropa. Serta Polandia yang memiliki posisi sebagai pintu gerbang masuk ke wilayah Uni-Eropa secara geografis, menjadi alasan bagi penulis untuk menggunakan kedua representasi negara tersebut.

Jerman

Jerman merupakan negara anggota Uni-Eropa yang dikenal memiliki jumlah migran yang cukup banyak. Jerman juga dikenal dengan kebijakan migrasinya yaitu *open door policy*. Kebijakan pintu terbuka ini merupakan kebijakan yang membuka perbatasan Jerman terhadap para pengungsi dan pencari suaka pada tahun 2015 hingga 2016. Kebijakan yang dikenal dengan nama *Willkommenskultur* ini diterapkan semasa pemerintahan Kanselir Angela Merkel pada krisis migran di tahun 2015-2016. Situasi konflik Suriah yang memanas di tahun 2015 membuat kebijakan ini mendapat banyak kritik dari Uni-Eropa dan masyarakat Jerman sendiri. Angela Merkel yang memiliki kepedulian tinggi terhadap nilai-nilai kemanusiaan memandang Jerman mampu untuk memberikan kesempatan yang lebih layak bagi para pengungsi dan pencari suaka dari Suriah (Saragih & Nababan, 2021). Pemberlakuan kebijakan *open door policy* di Jerman ini menjadi pemicu dari masuknya migran khususnya pencari suaka dan pengungsi dalam skala yang besar di Jerman.

Tabel.3 Data Jumlah Pengungsi Ukraina di Jerman

Tahun	Jumlah Pengungsi	Jumlah Suaka
2021	918	1.328
2022	1.002.999	1.383
2023	1.097.503	1.640
2024	1.205.729	1.830

Sumber : (UNHCR, 2025)

Data yang disajikan pada Tabel.3 menunjukkan bahwa adanya peningkatan drastis jumlah pengungsi asal Ukraina yang hadir di Jerman di tahun 2022. Bahkan dalam tahun-tahun selanjutnya, angka pengungsi yang hadir di Jerman tidak mengalami penurunan walaupun sedikit. Jerman yang merupakan bagian dari negara anggota Uni-Eropa juga turut mengimplementasikan kebijakan *Temporary Protective Direct*. Kebijakan regional ini menjadi faktor utama yang membuat angka masuknya migran dan pengungsi melonjak cukup besar di Jerman.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Herbert Brücker ada beberapa faktor yang menjadi bahan pertimbangan pengungsi dari Ukraina untuk memilih Jerman sebagai tempat pelariannya. Berdasarkan penelitian yang dilakukannya, enam puluh persen masyarakat Ukraina yang menjadi sampel dalam penelitian mengungkapkan bahwa keberadaan relasi keluarga di Jerman merupakan faktor pendorong mereka untuk melarika diri ke Jerman (Brücker et al., 2023). Di samping faktor relasi keluarga, persepsi positif masyarakat Ukraina terhadap dinamika sosial di Jerman, khususnya berkaitan dengan migran dan pengungsi sehingga hal tersebut juga menjadi daya tarik bagi masyarakat Ukraina. Citra positif dinamika sosial yang dimiliki Jerman ini tercermin dari budaya selamat datang atau *Willkommenskultur* (Brücker et al., 2023). Tampaknya citra positif yang dimiliki kebijakan *Willkommenskultur* masih relevan dengan para pengungsi dari Ukraina. Jerman juga terkenal dengan perekonomiannya yang stabil serta kebutuhannya akan para pekerja yang cukup tinggi. Jaminan sosial dan tunjangan hidup di Jerman menempati angka 22% sebagai alasan masyarakat Ukraina memilih menetap di Jerman. Berdasarkan data penelitian menggunakan sampel, dapat disimpulkan bahwa kondisi dinamika sosial dan ekonomi Jerman menjadi daya tarik bagi pengungsi untuk menetap.

Polandia

Polandia merupakan negara anggota Uni-Eropa yang menjadi garda terdepan di wilayah perbatasan timur Uni-Eropa. Dengan kondisi geografis yang dimilikinya, Polandia juga menjadi salah satu negara anggota Uni-Eropa yang menerima banyak pengungsi sebagai implikasi konflik Rusia-Ukraina pada fase awal. Berdasarkan data yang diperoleh dari Eurostat, Polandia menjadi negara anggota yang paling banyak menerima jumlah pengungsi dari Ukraina pada fase awal konflik berlangsung (Eurostat, 2024).

Tabel.4 Data Jumlah Pengungsi Ukraina di Polandia

Tahun	Jumlah Pengungsi	Jumlah Suaka
2021	422	109
2022	958.147	372
2023	955.891	1.005
2024	991.223	3.448

Sumber : (UNHCR, 2025)

Data pada Tabel.4 menunjukkan bahwa Polandia juga menjadi negara anggota Uni-Eropa yang terdampak arus migrasi dari konflik Rusia-Ukraina. Data yang tertera `pada tahun 2022 menunjukkan bahwa sebanyak 958.147 jiwa melarikan diri ke Polandia untuk mendapatkan perlindungan. Hingga tahun 2024 Polandia kembali didatangkan dengan 35.332 jiwa, yang jika dibandingkan tahun sebelumnya mengalami penurunan jumlah pengungsi sebesar 2.256 jiwa. Namun di tahun 2024 angka ini kembali naik menjadi 991.223 pengungsi yang berasal dari Ukraina dan berada di wilayah Polandia.

Jika dibandingkan dengan jumlah pengungsi Ukraina yang ada di Jerman, angka ini tidak dapat dikatakan sebagai jumlah terbesar. Sehingga Jerman menampung lebih banyak pengungsi dibandingkan dengan Polandia. Namun sebelum arus migrasi di tahun 2022, Polandia telah membuka dan menerima para migran pekerja asal Ukraina pada tiga hingga empat tahun ke belakang terhitung dari tahun 2018 (Harper, 2018). Jika dilihat dari pernyataan tersebut, terlihat bahwa Polandia dan Jerman memiliki masalah serupa terkait kurangnya ketersediaan tenaga kerja. Akan tetapi upah rata-rata yang dimiliki Jerman terlampaui jauh lebih tinggi dibandingkan yang ada di Polandia.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Eurostat, rata-rata upah yang diberikan di Jerman di tahun 2022 adalah 39,6 Euro per jam. Sedangkan di tahun yang sama, rata-rata upah yang diberikan di Polandia hanya berkisar 12,5 Euro per jam. Jumlah ini mencerminkan bahwa upah di Jerman lebih besar tiga kali lipat dibandingkan di Polandia dalam bidang yang sama yaitu industri, konstruksi dan jasa. Bahkan pada tahun 2024, rata-rata upah di Jerman masih jauh lebih unggul yaitu sebesar 43,4 Euro per jam. Sedangkan Polandia memiliki rata-rata upah sebesar 17,3 Euro per jamnya (Eurostat, 2025c). Jika ditelusuri lebih lanjut, aspek-aspek lain selain aspek sosial, ekonomi dan politik juga dapat menjadi penentu bagi para pengungsi untuk menetap di Jerman atau Polandia. Namun jika disimpulkan, mayoritas dari migran dan pengungsi yang memasuki wilayah Polandia hanya bersifat sementara. Polandia hanya dianggap sebagai tempat persinggahan bagi para migran dan pengungsi yang ingin melanjutkan migrasinya ke wilayah negara anggota lainnya yang dianggap dapat membawa mereka kepada nasib yang lebih baik.

Peran Uni-Eropa Sebagai Organisasi Regional Terhadap Fenomena Migrasi

Sebagai organisasi regional, Uni-Eropa berupaya untuk memberikan prosedur administrasi yang lebih singkat dan mencegah para migran untuk mendaftarkan dirinya ke beberapa negara anggota Uni-Eropa sekaligus, melalui pembentukan kebijakan Dublin. Namun kebijakan Dublin tidak berjalan dengan semestinya ketika krisis pengungsi tahun 2015 yang dipicu oleh Yunani membiarkan para pengungsi untuk bebas masuk dan keluar dari negaranya (Ramadhani et al., 2022). Kegagalan Kebijakan Dublin III pada tahun 2015 dalam mengatasi krisis migrasi di tahun tersebut menjadi faktor utama yang mendorong Uni-

Eropa untuk melakukan peninjauan kembali terhadap *Common European Asylum System* yang menuai banyak kritik. Sedari awal kebijakan Dublin juga telah menuai banyak kontroversi terkait pembagian beban kepada negara anggota yang dianggap tidak seimbang dan tanggungjawab tambahan yang diberikan berpotensi membuat negara tidak mampu memberikan perlindungan sebagaimana seharusnya (Fratzke, 2015). Kepentingan nasional yang mendominasi di antara negara anggota Uni-Eropa turut melemahkan solidaritas yang terjalin. Konsekuensi lainnya dari krisis tahun 2015 ini, turut menimbulkan pertanyaan dan ketidakpastian mengenai legitimasi dari Perjanjian Schengen yang merupakan pilar dalam kebijakan migrasi di Uni-Eropa (Ramadhani et al., 2022).

Sebagai organisasi regional, Uni-Eropa mencoba untuk menggunakan kekuasaannya dalam membentuk perjanjian kerjasama dengan aktor internasional lainnya (*The treaty making powers*). Hingga pada tahun 2016, Uni-Eropa berhasil menyepakati perjanjian dengan Turki pada 18 Maret 2016. Perjanjian ini dibentuk untuk membantu mengelola dan mengurangi arus migrasi yang masuk ke kawasan Uni-Eropa. Selain itu melalui perjanjian ini Uni-Eropa turut memberikan dukungan kepada Yordania dalam menampung pengungsi dari Suriah (European Commission, 2018). Pada tahun 2017, dalam merespon krisis migrasi yang dialami, Parlemen Eropa dan Dewan Eropa menyepakati beberapa proposal yang diajukan terkait kebijakan migrasi (Koenig, 2017). Tidak semua proposal yang diajukan disetujui oleh Parlemen dan Dewan Eropa. Proposal yang disetujui tersebut meliputi pembentukan Badan Suaka Uni-Eropa yang lengkap, reformasi Eurodac, tinjauan arahan Kondisi Penerimaan Migran, Peraturan Kualifikasi, dan kerangka Pemukiman kembali.

Hadirnya gelombang migrasi sebagai konsekuensi konflik Rusia-Ukraina hingga pengaktifan kebijakan *Temporary Protective Directive*, menimbulkan kekhawatiran beberapa negara anggota Uni-Eropa akan krisis yang mungkin terjadi lagi. Kekhawatiran tersebut mendorong sejumlah negara anggota Uni-Eropa untuk mendesak Parlemen Eropa dan Dewan supaya mempercepat proses reformasi sistem Migrasi dan Asylum yang baru. Dorongan tersebut dapat dilihat melalui pernyataan Kanselir Jerman yaitu Olaf Scholz yang menyampaikan, "*A reform of Europe's asylum system should happen before next year's European Parliament elections*" (AP News, 2023). Pernyataan tersebut juga menunjukkan keinginan Jerman yang ingin kebijakan migrasi dan kerangka kerjasama yang dibentuk Uni-Eropa dapat lebih responsif dan efektif.

Pact on Migration and Asylum merupakan bentuk respon dari Uni-Eropa sebagai organisasi regional dalam menanggapi ketidakpuasan beberapa negara anggota pada krisis migrasi yang lalu. Ketidakpuasan negara anggota terhadap sistem migrasi dan suaka yang telah ada, mendorong Uni-Eropa melalui Komisi Eropa untuk mengusulkan melakukan reformasi terhadap kebijakan *Common European Asylum System*. Reformasi terhadap Kebijakan *Common European Asylum System* menjadi Pakta Migrasi dan Suaka memiliki proses yang cukup panjang dengan dimulainya pengusulan reformasi pada September 2020 (EUAA, 2024). Adapun ketidakpuasan dan keberatan para negara anggota Uni-Eropa diakibatkan oleh distribusi tanggungjawab terhadap beban migran tidak seimbang. Pembagian tanggungjawab yang tidak seimbang tersebut kerap dirasakan oleh negara-negara anggota yang memiliki lokasi geografis sebagai pintu masuk atau gerbang menuju kawasan Uni-Eropa. Pakta ini disahkan oleh Parlemen Eropa dan Dewan pada Desember 2023 serta dipublikasikan pada Mei 2024 (Radjenovic, 2025). *Pact on Migration and Asylum* ini berfokus dalam mengembangkan kerangka kerjasama dan kebijakan yang telah ada. Di dalamnya pakta ini terdiri atas beberapa kebijakan yaitu Direktif Ketentuan Penerimaan, Peraturan Prosedur Suaka, Peraturan Prosedur Pemulangan Perbatasan, Peraturan Kerangka Kerja Pemukiman Kembali dan Penerimaan Kemanusiaan Uni Eropa, Peraturan Manajemen Suaka dan Migrasi, Amendemen Peraturan untuk Memfasilitasi Penyaringan, Peraturan Penyaringan dan yang terakhir Peraturan Eurodac (Bocková, 2024). Pada bulan September 2024 silam, *Pact on Migration and Asylum* telah memasuki tahap uji implementasi. Namun

sebelumnya, Uni-Eropa telah mengadakan *technical support* yang dihadiri oleh sembilan negara yaitu Belgia, Ceko, Jerman, Estonia, Yunani, Irlandia, Italia, Portugal, and Romania (European Commission, 2024). *Technical support* ini merupakan peran Uni-Eropa sebagai organisasi regional dalam membantu para negara anggota dalam merancang dan menyusun rencana kebijakan nasionalnya sesuai dengan reformasi kebijakan Uni-Eropa yang baru.

Pakta Migrasi dan Suaka ini akan diterapkan oleh seluruh negara anggota pada tahun 2026. Namun hasil dari reformasi kebijakan migrasi tidak lepas dari tuaian kritik beberapa negara anggota. Negara yang menjadi perbatasan Uni-Eropa seperti Polandia menjadi salah satu negara yang melakukan penolakan terhadap pakta terbaru ini. Perdana menteri Polandia yaitu Donald Tusk menyampaikan ketidaksetujuannya dalam pertemuannya dengan Presiden Komisi Eropa yaitu Ursula von der Leyen (Liboreiro, 2025). Melalui pernyataannya Tusk menyampaikan bahwa Polandia tidak akan mengimplementasikan kebijakan Pakta Migrasi dan Suaka, jika pengimplementasiannya mengharuskan Polandia untuk menambah kuota penerimaan migrasi. Hal ini tentu akan menambah beban untuk Polandia yang telah menampung banyak migran di wilayahnya. Pengandaian penolakan penambahan migrasi juga akan menuntut Polandia untuk menyalurkan €20,000 per individu sebagai dukungan kontribusi secara finansial (Del Monte & Orav, 2023). *Pact on Migration and Asylum* merupakan kebijakan Uni-Eropa yang bersifat mengikat. Sehingga dapat diartikan semua negara anggota wajib untuk meratifikasi kebijakan tersebut, namun hingga kini Uni-Eropa masih belum menetapkan konsekuensi yang akan diberlakukan jika negara anggota tidak meratifikasi kebijakan ini.

KESIMPULAN

Implikasi dari Konflik Rusia-Ukraina terhadap dinamika migrasi di kawasan Uni-Eropa menunjukkan dampak yang cukup signifikan. Data yang telah ditampilkan menunjukkan bahwa sebagian besar migran Ukraina termasuk dalam kategori *forced migrant*, yang merasa terpaksa untuk meninggalkan wilayahnya akibat adanya ancaman kelangsungan hidup bagi masyarakat sipil. Kondisi geografis wilayah Polandia sebagai pintu masuk Uni-Eropa di timur membuat Polandia menjadi penerima migran dan pengungsi pada fase awal konflik dalam jumlah besar. Namun kondisi ekonomi dan dinamika sosial yang ada di Jerman menuntun para migran dan pengungsi untuk menetap di sana dan menjadikan Polandia sebagai tempat sementara dalam persinggahan. Jerman yang dikenal dengan sifatnya yang terbuka terhadap migran melalui kebijakan *Willkommenskultur* juga menjadi salah satu negara yang menerima migran dan pengungsi dalam skala besar. Berbeda dengan keyakinannya dalam mengelola migran pada periode 2015-2016, realita dinamika migrasi tahun 2022 mendorong Jerman untuk mempertimbangkan pembatasan jumlah migran yang masuk ke wilayahnya. Pertimbangan tersebut dapat dilihat melalui permintaannya terhadap Uni-Eropa terkait menindaklanjuti reformasi dengan lebih cepat. Bahkan setelah *Pact on Migration and Asylum* memasuki tahap implementasi, Jerman telah berencana untuk mengimplementasikan sistem tersebut ke dalam regulasi nasionalnya secepatnya.

Uni Eropa telah berupaya menjalankan perannya sebagai organisasi regional, salah satunya dengan menjaga hubungan baik dan solidaritasnya melalui pengaktifan *Temporary Protection Directive*. Kebijakan ini secara khusus bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi migran dan pengungsi dari Ukraina. Namun sebagai organisasi regional, Uni-Eropa masih menghadapi tantangan serius dalam mendistribusikan tanggungjawab yang seimbang dengan kepentingan nasional negara-negara anggotanya. Perspektif ketidakseimbangan dalam pendistribusian beban yang dirasakan oleh beberapa negara berpotensi melemahkan solidaritas yang dimiliki oleh negara-negara anggota Uni-Eropa. Uni Eropa telah berupaya menjalankan perannya sebagai organisasi regional dalam mereformasi kebijakan migrasinya. Namun penulis menyadari bahwa konsep temuan yang digunakan dalam kerangka analisis yang digunakan masih kurang spesifik dalam menguraikan peran komprehensif Uni Eropa

sebagai organisasi regional dalam menghadapi kompleksitas isu migrasi ini. Hal ini berimplikasi pada eksplorasi dan analisis yang belum dapat sepenuhnya menangkap dinamika kompleks dari migrasi yang terjadi di kawasan Uni-Eropa.

REFERENSI

- Achsin, M. Z. (2021). *Teori-Teori Migrasi Internasional*. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=T55BEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA30&dq=migran+internasional&ots=pHX24PBBqB&sig=YZsIObQvxHVJ5De42xUXW7LUX0M&redir_esc=y#v=onepage&q=migran+internasional&f=false
- AP News. (2023, May 9). *Germany's Scholz urges EU to reform, strike migrants deal* | AP News. <https://apnews.com/article/european-union-germany-scholz-speech-migration-parliament-02766ea3d2b1141276a370abf7203e1c>
- Bocková, L. (2024). PACT ON MIGRATION AND ASYLUM. In *Trends, Challenges, Perspectives*. [https://doi.org/ISBN 978-80-225-5205-9](https://doi.org/ISBN%20978-80-225-5205-9)
- Brücker, H., Ette, A., Grabka, M. M., Kosyakova, Y., Niehues, W., Rother, N., Spieß, C. K., Zinn, S., Bujard, M., Silva, A. R. C., Décieux, J. P., Maddox, A., Milewski, N., Sauer, L., Schmitz, S., Schwanhäuser, S., Siegert, M., Steinhauer, H., & Tanis, K. (2023). Ukrainian Refugees in Germany: Evidence From a Large Representative Survey. *Comparative Population Studies*, 48, 395–424. <https://doi.org/10.12765/CPOS-2023-16>
- Del Monte, M., & Orav, A. (2023). *Solidarity in EU asylum policy*. January, 1–8. [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/649344/EPRS_BRI\(2020\)649344_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/649344/EPRS_BRI(2020)649344_EN.pdf)
- EUAA. (2024). *2.1. Reforming the Common European Asylum System* | European Union Agency for Asylum. <https://euaa.europa.eu/asylum-report-2024/21-reforming-common-european-asylum-system>
- European Commission. (2018). *EU-Turkey Statement*. <https://doi.org/10.2775/43>
- European Commission. (2024, August 1). *Nine EU countries receive technical support for the implementation of the Pact*. https://home-affairs.ec.europa.eu/news/nine-eu-countries-receive-technical-support-implementation-pact-2024-08-01_en
- Eurostat. (2024). *Migration and asylum in Europe Interactive publications*. <https://ec.europa.eu/eurostat/web/interactive-publications/migration-2024>
- Eurostat. (2025a). *Asylum applicants by type, citizenship, age and sex*. https://doi.org/https://doi.org/10.2908/MIGR_ASYAPPCTZA
- Eurostat. (2025b). *Beneficiaries of temporary protection at the end of the month by citizenship, age and sex - monthly data*. https://doi.org/https://doi.org/10.2908/MIGR_ASYTPSM
- Eurostat. (2025c, March 28). *Labour cost levels by NACE Rev. 2 activity*. https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/lc_lci_lev__custom_17266909/default/table?lang=en
- Fettouche, C. (2021). *What is the European Union? Infographics of the EU System 2021 - Humanitarian Designers*. <https://www.humanitariandesigners.org/2021/01/28/european-union-infographic/>
- Fratzke, S. (2015). Not Adding Up: The Fading Promise of Europe's Dublin System. In *Migration Policy Institute Europe: Vol. March 2015*.
- Frontex. (2025). *Migratory Map*. <https://www.frontex.europa.eu/what-we-do/monitoring-and-risk-analysis/migratory-map/>
- GENÇ, H. D., & ŞİRİN ÖNER, N. A. (2019). Why not Activated? The Temporary Protection Directive and the Mystery of Temporary Protection in the European Union. *International Journal of Political Science and Urban Studies*, 7(1), 1–18. <https://doi.org/10.14782/IPSUS.539105>
- Harper, J. (2018, January 30). *Poland fears economic hit as EU opens door to Ukrainians*.

- Deutsche Welle. <https://www.dw.com/en/poland-fears-economic-hit-as-eu-opens-door-to-ukrainians/a-42367764>
- Koenig, N. (2017). The EU's External Migration Policy: Towards Win-Win-Win Partnerships. In *Jacques Delors Institute Policy Paper* (No. 190; Issue April). http://www.delorsinstitut.de/2015/wp-content/uploads/2017/04/20170406_ExternalMigrationPolicy-NKoenig.pdf
- Liboreiro, J. (2025, February 7). *Poland will not implement Migration Pact, Donald Tusk tells Ursula von der Leyen* | Euronews. <https://www.euronews.com/my-europe/2025/02/07/poland-will-not-implement-migration-pact-donald-tusk-tells-ursula-von-der-leyen>
- Logayah, D. S., Rahmawati, R. P., Hindami, D. Z., & Mustikasari, B. R. (2023). Krisis Energi Uni Eropa: Tantangan dan Peluang dalam Menghadapi Pasokan Energi yang Terbatas. *Hasanuddin Journal of International Affairs*, 3(2), 102–110. <https://doi.org/10.31947/hjirs.v3i2.27052>
- Luyten, K. (2024). *Temporary Protection Directive* (Issue February 2022). <https://doi.org/PE762.373>
- Prasetyo, T. A., Syah, N. F. M., Ghofari, A., Aidah, N., Faruq, U., Mirzak, M., & Khatimah, D. (2024). Pengaruh Perang Rusia-Ukraina Terhadap Ekonomi Internasional. *At-Tawazun, Jurnal Ekonomi Syariah*, 12(01), 23–31. <https://doi.org/10.55799/tawazun.v12i01.491>
- Quinn, S., & Ruiz, I. (2022). Forced migration: evidence and policy challenges. *Oxford Review of Economic Policy*, 38(3), 403–413. <https://doi.org/10.1093/oxrep/grac025>
- Radjenovic, A. (2025). *Analysis of the New EU Pact on Migration and Asylum* (Issue February). www.euromedrights.org
- Ramadhani, H. N. F., Viani Puspita Sari, & Fuad Azmi. (2022). European Union Cross-Border Refugees Securitization toward Freedom of Movement Regime 2015-2020. *Jurnal Global & Strategis*, 16(2), 217–238. <https://doi.org/10.20473/JGS.16.2.2022.217-238>
- Saragih, H. M., & Nababan, R. S. (2021). Kebijakan Jerman atas Pemberian Suaka Terhadap Pengungsi Asal Suriah Tahun 2015-2016. *Himmah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 5(1), 337–358. <https://doi.org/10.47313/jkik.v5i1.1392>
- Sugito, S. (2021). Eropanisasi Kebijakan Imigrasi Dan Politisasi Keamanan Imigran Di Negara-Negara Visegrad. *Intermestic: Journal of International Studies*, 6(1), 27. <https://doi.org/10.24198/intermestic.v6n1.3>
- UNHCR. (2025). *Refugee Data Finder*. https://www.unhcr.org/refugee-statistics/download?data_finder%5BdataGroup%5D=displacement&data_finder%5Bdataset%5D=population&data_finder%5BdisplayType%5D=totals&data_finder%5BpopulationType%5D%5B%5D=REF&data_finder%5BpopulationType%5D%5B%5D=ASY&data_finder
- USA for UNHCR. (2025). *Ukraine Refugee Crisis: Aid, Statistics and News*. <https://www.unrefugees.org/emergencies/ukraine/>
- yulia hartati, anna. (2016). *Immigration Policy in the European Union: Opportunities, Challenges and Dilemmas* | Hartati | *Proceeding Of The International Seminar and Conference on Global Issues*. 1–8. <https://www.publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/ISC/article/view/1679>